Gema Islam

Digitalisasi oleh Penggiat Buku

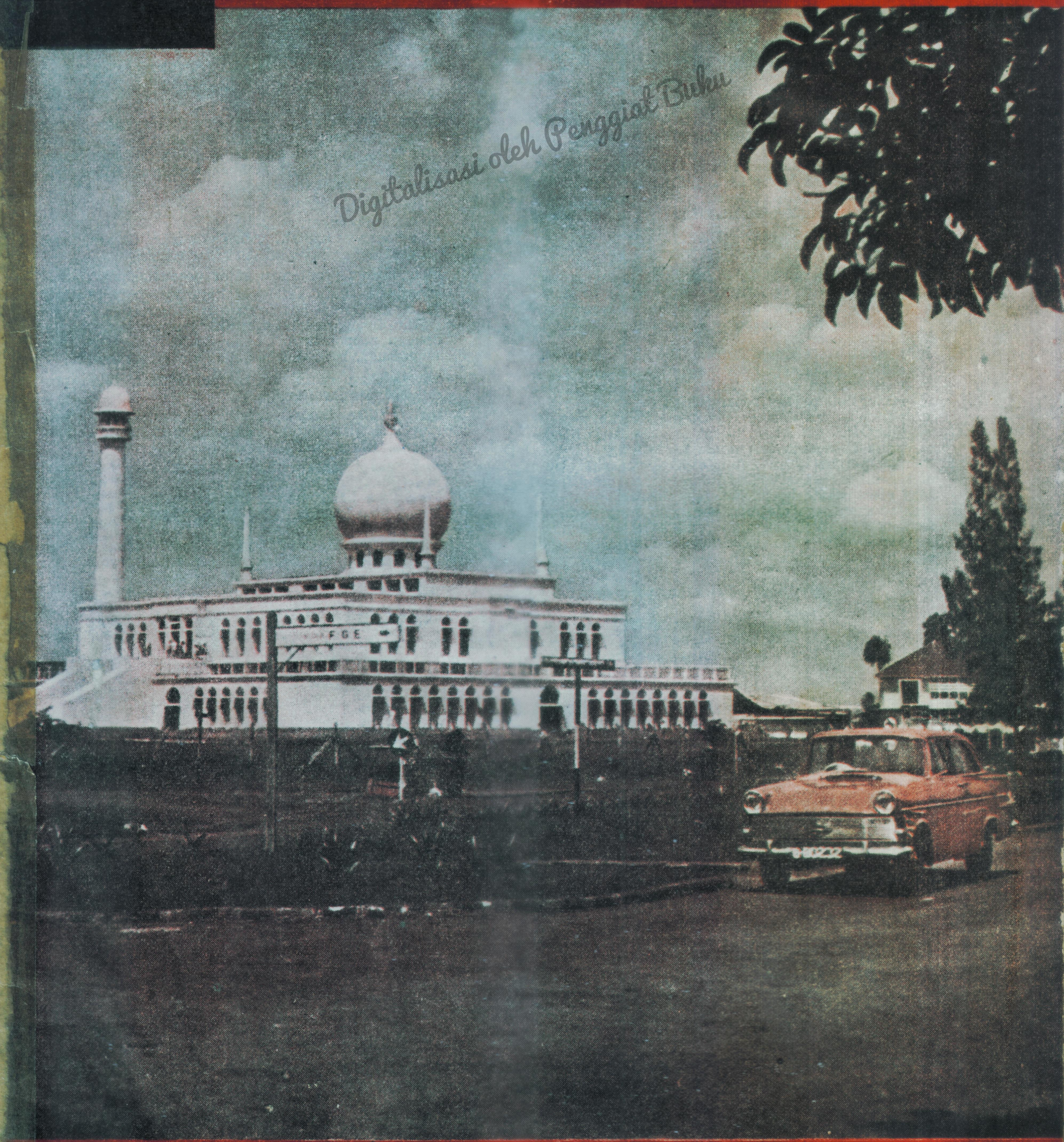

1

madjallah
pengetahuan dan kebudajaan

PERPISAHAN AGAMA dan NEGARA

Oleh: Mr Mohamad Roem

Soal perpisahan agama dan negara bukan persoalan jang baru. Sedjak umat manusia mengetahui arti dari dua perkataan itu, atau lebih djelas umat manusia beragama dan bernegara, persoalan itu senantiasa menggerakkan pikiran manusia. Mau atau tidak mau kita dipaksa mendudukkan tiap2 dari artinja ditempat jang wadjar, sesuai dengan pengertian dan kemampuan kita pada suatu saat.

Kadang2 atau sering pengertian dan pendapat kita berlainan dengan apa jang sedang berdjalan dalam hubungan agama dan negara, dan kita menganggap pendapat kita sudah benar, sedangkan jang sedang berdjalan hidup terus. Kita tidak merasa perlu menindjau kembali pendapat kita jang lain dengan jang sedang berdjalan itu.

Saja menjadari benar2, bahwa saja dalam kuliah umum ini tidak memadjukan soal jang baru jang sangat menarik hati, bahkan soal jang lama jang rupanja akan tetap mendjadi soal selama umat manusia beragama dan bernegara. Hanja sadja baru2 ini soal ini di Amerika mendjadi soal jang hangat lagi. Karena kita sekarang ini sedang asjik bernegara dan kita adalah suatu bangsa jang sangat kuat beragama, meskipun dengan sedikit ragu2, saja kira soal itu dapat saja sadjikan sebagai atjara dalam kuliah umum ini.

Waktu Kennedy dua tahun jang lalu muntjul sebagai tjalon partai Demokrat dalam pilihan Presiden Amerika Serikat soal hubungan atau perpisahan Agama dan Negara ini timbul kembali dengan hebat. Sebagai kita ketahui, Kennedy seorang beragama Katholiek jang achirnja terpilih mendjadi Presiden. Ia seorang Katholiek jang pertama kali terpilih mendjadi Presiden Amerika Serikat.

Apa sebab soal ini muntjul dan mendjadi pertentangan jang hebat pada waktu itu? Karena agama Katholiek dalam peladjarannja pada pokoknja berdiri pada asas, bahwa agama dan negara itu bersatu, tidak boleh terpisah, bahwa siapa jang berkuasa dalam agama, berkuasa dalam negara.

Vatikanstad adalah suatu tjontoh jang murni dari persatuan agama dan negara. Vatikanstad merupakan suatu negara dalam arti jang modern. Ia mempunjai wilajah, mempunjai penduduk dan mempunjai pemerintah. Ia mengirimkan wakil2nja ke-negara2 lain dan menerima wakil2nja dari negara lain itu. Indonesia mempunjai wakil pada Vatikanstad jang berpangkat duta. Di Djakarta berdiri wakil Vatikanstad dengan pangkat internunsius.

Dalam diri Paus didjelmakan persatuan agama dan negara. Dalam soal2 kenegaraan ia mendjadi kepala eksecutief. Ia mendjadi Kepala Agama jang menurut doktrin Katholiek menentukan apa jang harus mendjadi kepertjajaan umat Katholiek. Dengan singkat Paus dalam kekuasaannja mempersatukan otoriteit jang menentukan nasib ummatnja baikpun didunia maupun diachirat.

Selama kampanje pemilihan Presiden Amerika Serikat jang baru lalu, persoalan itu mendjadi hangat dan merupakan pertentangan jang hebat. Meskipun pertentangan itu sebagian besar disebabkan oleh maksud2 politik, jaitu agar djangan Kennedy dipilih mendjadi Presiden, akan tetapi kita dapat djuga mengambil alasan2 jang benar, jang merupakan usaha sungguh2 untuk mendudukkan soal itu dengan sewadjarnja, jaitu bagaimana perpisahan atau hubungan agama dan negara itu harus diatur, agar masing2 mempunjai dan menunaikan fungsinja dengan se-baik2nja.

Sudah barang tentu sanggahan terhadap tjalon Kennedy itu terutama datangnja dari pihak Protestan, jang seperti terdjantum dalam namanja dalam riwajat agama Nasrani muntjul mendjadi golongan sendiri karena memprotes kekuasaan Paus jang memegang otoriteit baik mengenai soal2 kenegaraan maupun mengenai soal kepertjajaan.

Salah seorang jang menentang pentjalonan Kennedy, jalah Bishop Episcopal Protestan dari California, jaitu the Right Reverend James A. Pike. Ia bentangkan sanggahan2 itu dalam buku jang ia karang, berdjudul: „A Catholic in the White House?", „Seorang Katholiek di Gedung Putih?".

Bishop James A. Pike mengemukakan, bahwa berkenaan dengan doktrin agama Katholiek soalnja mendjadi terlalu penting untuk dibiarkan sadja. Soalnja ialah dimana letaknja kesetiaan seorang Presiden jang beragama Katholiek. Begitu pula penting untuk ditanjakan, bagaimana pendirian Presiden tentang hubungan geredja dengan negara.

Kata Bishop James A. Pike, marilah kita singkirkan dulu faktor purba sangka. Kita tidak boleh berkeberatan terhadap tjalon seorang Katholiek, semata2 karena agamanja. Akan tetapi ada perbedaan jang sangat besar antara menentang tjalon seorang Katholiek karena agamanja dengan menentang tjalon itu karena agamanja dapat mempengaruhi kemampuan untuk menduduki sesuatu djabatan.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa tjontoh. Ada segolongan orang Kristen jang disebut golongan Christian Scientist.

Golongan ini mempunjai kepertjajaan bahwa semua penjakit dapat diobati dengan berdo'a atau bersembahjang. Orang tidak boleh keberatan terhadap seorang jang mendjadi seorang Christian Scientist, karena U.U.D. men djamin kebebasan beragama. Akan tetapi orang dapat berkeberatan terhadap seorang Christian Scientist tulen jang mendjadi Menteri Kesehatan.

Ada lagi suatu golongan orang Kristen jang dinamakan Quakers. Golongan ini prinsipiil anti menggunakan kekerasan, seperti Mahatma Gandhi jang berkejakinan, bahwa kekerasan tidak boleh dipergunakan. Bagaimanakah djika seorang Quaker mendjadi Menteri Pertahanan? Terhadap tjalon Kennedy pada waktu itu dikemukakan pertanjaan bagaimana pendapatnja tentang birthcontrol, pengaturan atau pembatasan kelahiran. Menurut doktrin Katholiek birth-control adalah sesuatu tindakan jang terlarang.

Untuk memahami soal perpisahan agama dengan negara lebih landjut, ada baiknja djika kita lihat bagaimana soal itu dimasa jang lampau. Maka adalah dua pandangan, dua2nja agak extreem. Dalam riwajat umat manusia kita menemui dua djenis hubungan ini dengan saling berganti.

Pertama hubungan, dalam mana negara berkuasa diatas geredja.

Di negara2 Komunis, geredja sepenuhnja dikuasai oleh negara, malahan geredja dipergunakan sebagai alat propaganda dari negara.

Disamping itu ada hubungan antara negara dan geredja, dimana negara mempunjai kekuasaan atas geredja, meskipun hanja tinggal simbolis sadja. Ratu Inggeris masih mempunjai kedudukan sebagai Kepala dari „The Church of England". Dalam nama resmi jang pandjang masih dapat dibatja, bahwa ia „Defender of the faith" pembela agama. Bishop2 dari The Church of England" diangkat oleh Radja.

Ketika pada tahun 1570 timbul perselisihan antara Paus Pius V dengan Ratu Elizabeth I dari Inggeris, maka Paus Pius tarik kembali penobatan jang telah dilakukan olehnja. Ini dapat diartikan, bahwa Paus membebaskan rakjat bawahan Ratu Elizabeth daripada kesetiaan kepada ratunja. Bagi orang Inggeris jang pada waktu itu menjatakan persetudjuan untuk Geredja Roma, timbullah satu situasi jang sangat gawat. Mereka mendjadi pengchianat, kalau tidak terhadap negaranja, terhadap geredjanja. Tidak ada alternatif lainnja.

Dalam doktrine agama Katholiek memang ada suatu principe, bahwa Paus mempunjai kedaulatan atas jang berkuasa didunia, dan principe ini tidak pernah ditjabut, sehingga kemungkinan perselisihan sematjam itu tetap masih ada.

Dalam kalangan umat Katholiek sendiri ada dua pendapat tentang hubungan geredja dan negara, jang satu bertentangan dengan Konstitusi Amerika, jang lainnja tidak.

Pertama: pendapat resmi. Pendapat ini jang paling tua. Ditahun 1864 Paus Pius IX dalam peraturannja jang berdjudul Syllabus of Errors" ia mengutuk perpisahan agama dan geredja. Paus menjatakan, bahwa adalah salah, djika orang berusaha untuk melepaskan peladjaran umum dari pengawasan geredja, bahwa adalah salah, djika orang berpendirian, bahwa tiap orang bebas untuk mengakui dan memeluk agama jang ia pertjajai. Ia menjesalkan, bahwa dibeberapa negara Katholiek, Pemerintahnja membiarkan warga-negaranja mengamalkan dengan setjara umum agamanja menurut kejakinan masing2.

Benar, kata Bishop James A. Pike, semua itu dinjatakan seabad jang lalu. Tapi dapatlah kita lupakan? Djika itu

*) Kuliah umum diutjapkan pada pembukaan Perguruan Tinggi Sjarif Hidajatullah, Tjeribon, tanggal 22 Nopember 1961.

PERPISAHAN AGAMA dan NEGARA

Oleh: Mr Mohamad Roem

Soal perpisahan agama dan negara bukan persoalan jang baru. Sedjak umat manusia mengetahui arti dari dua perkataan itu, atau lebih djelas umat manusia beragama dan bernegara, persoalan itu senantiasa menggerakkan pikiran manusia. Mau atau tidak mau kita dipaksa mendudukkan tiap² dari artinja ditempat jang wadjar, sesuai dengan pengertian dan kemampuan kita pada suatu saat.

Kadang² atau sering pengertian dan pendapat kita berlainan dengan apa jang sedang berdjalan dalam hubungan agama dan negara, dan kita menganggap pendapat kita sudah benar, sedangkan jang sedang berdjalan hidup terus. Kita tidak merasa perlu menindjau kembali pendapat kita jang lain dengan jang sedang berdjalan itu.

Saja menjadari benar², bahwa saja dalam kuliah umum ini tidak memadjukan soal jang baru jang sangat menarik hati, bahkan soal jang lama jang rupanja akan tetap mendjadi soal selama umat manusia beragama dan bernegara. Hanja sadja baru² ini soal ini di Amerika mendjadi soal jang hangat lagi. Karena kita sekarang ini sedang asjik bernegara dan kita adalah suatu bangsa jang sangat kuat beragama, meskipun dengan sedikit ragu², saja kira soal itu dapat saja sadjikan sebagai atjara dalam kuliah umum ini.

Waktu Kennedy dua tahun jang lalu muntjul sebagai tjalon partai Demokrat dalam pilihan Presiden Amerika Serikat soal hubungan atau perpisahan Agama dan Negara ini timbul kembali dengan hebat. Sebagai kita ketahui, Kennedy seorang beragama Katholiek jang achirnja terpilih mendjadi Presiden. Ia seorang Katholiek jang pertama kali terpilih mendjadi Presiden Amerika Serikat.

Apa sebab soal ini muntjul dan mendjadi pertentangan jang hebat pada waktu itu? Karena agama Katholiek dalam peladjarannja pada pokoknja berdiri pada asas, bahwa agama dan negara itu bersatu, tidak boleh terpisah, bahwa siapa jang berkuasa dalam agama, berkuasa dalam negara.

Vatikanstad adalah suatu tjontoh jang murni dari persatuan agama dan negara. Vatikanstad merupakan suatu negara dalam arti jang modern. Ia mempunjai wilajah, mempunjai penduduk dan mempunjai pemerintah. Ia mengirimkan wakil²nja ke-negara² lain dan menerima wakil²nja dari negara lain itu. Indonesia mempunjai wakil pada Vatikanstad jang berpangkat duta. Di Djakarta berdiri wakil Vatikanstad dengan pangkat internunsius.

Dalam diri Paus didjelmakan persatuan agama dan negara. Dalam soal² kenegaraan ia mendjadi kepala eksecutief. Ia mendjadi Kepala Agama jang menurut doktrin Katholiek menentukan apa jang harus mendjadi kepertjajaan umat Katholiek. Dengan singkat Paus dalam kekuasaannja mempersatukan otoriteit jang menentukan nasib ummatnja baikpun didunia maupun diachirat.

Selama kampanje pemilihan Presiden Amerika Serikat jang baru lalu, persoalan itu mendjadi hangat dan merupakan pertentangan jang hebat. Meskipun pertentangan itu sebagian besar disebabkan oleh maksud² politik, jaitu agar djangan Kennedy dipilih mendjadi Presiden, akan tetapi kita dapat djuga mengambil alasan² jang benar, jang merupakan usaha sungguh² untuk mendudukkan soal itu dengan sewadjarnja, jaitu bagaimana perpisahan atau hubungan agama dan negara itu harus diatur, agar masing² mempunjai dan menunaikan fungsinja dengan se-baik²nja.

Sudah barang tentu sanggahan terhadap tjalon Kennedy itu terutama datangnja dari pihak Protestan, jang seperti tertjantum dalam namanja dalam riwajat agama Nasrani muntjul mendjadi golongan sendiri karena memprotes kekuasaan Paus jang memegang otoriteit baik mengenai soal² kenegaraan maupun mengenai soal kepertjajaan.

Salah seorang jang menentang pentjalonan Kennedy, jalah Bishop Episcopal Protestan dari California, jaitu the Right Reverend James A. Pike. Ia bentangkan sanggahan² itu dalam buku jang ia karang, berdjudul: „A Catholic in the White House?", „Seorang Katholiek di Gedung Putih?".

Bishop James A. Pike mengemukakan, bahwa berkenaan dengan doktrin agama Katholiek soalnja mendjadi terlalu penting untuk dibiarkan sadja. Soalnja ialah dimana letaknja kesetiaan seorang Presiden jang beragama Katholiek. Begitu pula penting untuk ditanjakan, bagaimana pendirian Presiden tentang hubungan geredja dengan negara.

Kata Bishop James A. Pike, marilah kita singkirkan dulu faktor purba sangka. Kita tidak boleh berkeberatan terhadap tjalon seorang Katholiek, semata² karena agamanja. Akan tetapi ada perbedaan jang sangat besar antara menentang tjalon seorang Katholiek karena agamanja dengan menentang tjalon itu karena agamanja dapat mempengaruhi kemampuan untuk menduduki sesuatu djabatan.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa tjontoh. Ada segolongan orang Kristen jang disebut golongan Christian Scientist.

Golongan ini mempunjai kepertjajaan bahwa semua penjakit dapat diobati dengan berdo'a atau bersembahjang. Orang tidak boleh keberatan terhadap seorang jang mendjadi seorang Christian Scientist, karena U.U.D. men djamin kebebasan beragama. Akan tetapi orang dapat berkeberatan terhadap seorang Christian Scientist tulen jang mendjadi Menteri Kesehatan.

Ada lagi suatu golongan orang Kristen jang dinamakan Quakers. Golongan ini prinsipiil anti menggunakan kekerasan, seperti Mahatma Gandhi jang berkejakinan, bahwa kekerasan tidak boleh dipergunakan. Bagaimanakah djika seorang Quaker mendjadi Menteri Pertahanan? Terhadap tjalon Kennedy pada waktu itu dikemukakan pertanjaan bagaimana pendapatnja tentang birthcontrol, pengaturan atau pembatasan kelahiran. Menurut doktrin Katholiek birth-control adalah sesuatu tindakan jang terlarang.

Untuk memahami soal perpisahan agama dengan negara lebih landjut, ada baiknja djika kita lihat bagaimana soal itu dimasa jang lampau. Maka adalah dua pandangan, dua²nja agak extreem. Dalam riwajat umat manusia kita menemui dua djenis hubungan ini dengan saling berganti.

Pertama hubungan, dalam mana negara berkuasa diatas geredja.

Di negara² Komunis, geredja sepenuhnja dikuasai oleh negara, malahan geredja dipergunakan sebagai alat propaganda dari negara.

Disamping itu ada hubungan antara negara dan geredja, dimana negara mempunjai kekuasaan atas geredja, meskipun hanja tinggal simbolis sadja. Ratu Inggeris masih mempunjai kedudukan sebagai Kepala dari „The Church of England". Dalam nama resmi jang pandjang masih dapat dibatja, bahwa ia „Defender of the faith" pembela agama. Bishop² dari The Church of England" diangkat oleh Radja.

Ketika pada tahun 1570 timbul perselisihan antara Paus Pius V dengan Ratu Elizabeth I dari Inggeris, maka Paus Pius tarik kembali penobatan jang telah dilakukan olehnja. Ini dapat diartikan, bahwa Paus membebaskan rakjat bawahan Ratu Elizabeth daripada kesetiaan kepada ratunja. Bagi orang Inggeris jang pada waktu itu menjatakan persetudjuan untuk Geredja Roma, timbullah satu situasi jang sangat gawat. Mereka mendjadi pengchianat, kalau tidak terhadap negaranja, terhadap geredjanja. Tidak ada alternatif lainnja.

Dalam doktrine agama Katholiek memang ada suatu principe, bahwa Paus mempunjai kedaulatan atas jang berkuasa didunia, dan principe ini tidak pernah ditjabut, sehingga kemungkinan perselisihan sematjam itu tetap masih ada.

Dalam kalangan umat Katholiek sendiri ada dua pendapat tentang hubungan geredja dan negara, jang satu bertentangan dengan Konstitusi Amerika, jang lainnja tidak.

Pertama: pendapat resmi. Pendapat ini jang paling tua. Ditahun 1864 Paus Pius IX dalam peraturannja jang berdjudul Syllabus of Errors" ia mengutuk perpisahan agama dan geredja. Paus menjatakan, bahwa adalah salah, djika orang berusaha untuk melepaskan peladjaran umum dari pengawasan geredja, bahwa adalah salah, djika orang berpendirian, bahwa tiap orang bebas untuk mengakui dan memeluk agama jang ia pertjajai. Ia menjesalkan, bahwa dibeberapa negara Katholiek, Pemerintahnja membiarkan warga-negaranja mengamalkan dengan setjara umum agamanja menurut kejakinan masing².

Benar, kata Bishop James A. Pike, semua itu dinjatakan seabad jang lalu. Tapi dapatlah kita lupakan? Djika itu

---

*) Kuliah umum diutjapkan pada pembukaan Perguruan Tinggi Sjarif Hidajatullah, Tjeribon, tanggal 22 Nopember 1961.

TRI KOMANDO RAKJAT

Kami Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersendjata untuk pada setiap waktu dan kami akan tetapkan mendjalankan tugas-kewadjiban membebaskan Irian Barat, tanah-air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda. Dan ini oleh karena Belanda masih tetap mau melandjutkan kolonialisme ditanah-air kita Irian Barat dengan memetjah-belah bangsa dan tanah-air Indonesia, maka kami perintahkan kepada Rakjat Indonesia, djuga jang berada didaerah Irian-Barat untuk melaksanakan Tri-Komando sebagai berikut :

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkanlah sang Merah-Putih di Irian Barat, tanah-air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah-air dan bangsa.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkati perdjuangan kemerdekaan Indonesia.

Jogjakarta, 19 Desember 1961
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia.
SUKARNO
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/
Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat.

mengenai geredja lain, mungkin dapat. Tapi kata Kepala geredja Katholiek termasuk golongan istimewa.

Ditahun 1870 Dewan Vatican menjatakan, bahwa Paus adalah berdaulat, djika ia bertindak „ex cathedra" mengenai soal² moral dan kepertjajaan, dan geredja Katholiek mengadjarkan, bahwa pernjataan Paus Pius IX itu mengikat semua orang jang beragama Katholiek. Oleh karena itu, maka pendapat „resmi" itu menuntut ketaatan, baikpun di zaman jang sudah maupun dizaman sekarang. Begitulah pendapat resmi dari Geredja Katholiek. Disamping itu ada pendapat lain, jang oleh Bishop James A. Pike tadi dinamakan: *Tafsiran Amerika.*

The reverend John Courtney Murray, seorang ahli agama Katholiek mengemukakan bhw. pendirian Paus Pius IX, jang mengutuk perpisahan agama dan negara ditudjukan kepada suatu keadaan jang buruk, jaitu liberalisme dari abad ke-19 jang merupakan suatu antjaman bagi geredja Katholiek.

Demokrasi Amerika, kata Murray, adalah kuda jang lain warnanja. Ia pertjaja, bahwa Geredja Katholiek dapat dibawa kepada pengakuan, bahwa Amerika mempunjai tradisi sendiri, jaitu perpisahan antara agama dan negara. Tradisi Amerika itu sudah berdjalan lama, maka karena itu oleh Murray dikemukakan, apakah Geredja Katholiek di Amerika dibolehkan melalui djalan sendiri dalam lapangan hubungan agama dan negara dengan tetap taat kepada pokok² Agama Katholiek jang esentiil.

Ditahun 1948, dimana Geredja Katholiek di Roma dengan tegas menerangkan, bahwa dalam soal² „kebenaran" dan „kesalahan", adalah hanja Paus jang memegang kedaulatan, para bishop Katholiek di Amerika menjatakan, bahwa tradisi Amerika merupakan kerdja sama jang bebas antara pemerintah dan golongan² agama, dengan tidak ada suatu golongan jang mempunjai privilege dan tidak ada pembatasan dalam kebebasan beragama dari tiap² warganegara.

Tafsiran Amerika ini, jang didukung oleh sebagian besar umat Katholiek di Amerika tidak sesuai dengan pendapat resmi dari Roma, akan tetapi hingga sekarang belum ada tanda² bahwa Geredja Roma akan mengambil tindakan terhadap penjimpangan dari Geredja Katholiek di Amerika.

Kembali kepada tjalon Kennedy, Bishop James A. Pike menjatakan, bahwa djika Kennedy mendjundjung tinggi pendirian resmi dari Geredja Roma, ia menjatakan tidak dapat menjokong pentjalonan itu. Akan tetapi, djika ia mendjundjung tinggi tradisi Amerika, seperti diterangkan oleh Father Murray maka ia dapat menerima tjalon Kennedy. Semua itu dengan memperhatikan sjarat² ketjakapan jg. objectief.

Tjalon Kennedy sendiri waktu itu menerangkan, bagaimanapun agama seseorang, untuk orang jang bertanggung djawab tidak ada jang lebih tinggi ketjuali sumpah djabatan. Oleh pers dari Geredjanja, keterangan ini dikatakan bukan doktrine Katholiek jang baik.

Selain itu tjalon Kennedy pun telah mendjandjikan, bahwa djika ia dipilih mendjadi Presiden, ia tidak akan membuka perwakilan di Vatikanstad dan tidak akan memberi bantuan kepada sekolah² parochie. Mengenai bantuan dalam lapangan family planning kepada lain² negara, djika negara itu menghendaki, Amerika patut memberikannja.

Tradisi Amerika, jang berupa perpisahan antara agama dan negara itu, adalah tradisi jang mengikat semua golongan agama. Golongan agama Katholiek jang merupakan minoritet di Amerika menjesuaikan diri dengan tradisi itu dan menurut Father Murray tadi meskipun menjimpang dari pendapat resmi, tapi tidak bertentangan dengan pokok² agama Katholiek jang essentiil.

Seperti telah diterangkan diatas, arti perpisahan agama dan negara, terbatas dalam soal apakah Geredja Katholiek jang mempunjai pemimpin Sentral, jaitu Paus, mempunjai otoriteit atas umatnja, jang menduduki djabatan kenegaraan. Presiden Kennedy, sebagai orang Katholiek adalah dibawah Paus sebagai kepala agama, tapi sebagai Presidan Amerika ia tidak terikat, melainkan oleh sumpah djabatannja.

Meskipun di Amerika ada tradisi perpisahan negara dan agama, ini tidak berarti bahwa dalam penghidupan negara, agama itu didjauhkan sebanjak mungkin. Dengan tidak menjimpang dari soal tadi dalam principnja, tergantung dari sikap umatnja, apakah hubungan agama dan negara merupakan hubungan jang akrab.

Di negara kita ini ada tradisi jang baik, jang didjundjung tinggi oleh Kepala Negara kita, jaitu tiap² hari besar Islam dirajakan di Istana. Suatu upatjara kenegaraan jang penting, jaitu hari proklamasi, ditutup dengan batjaan do'a, oleh seorang alim"lama.

Pembangunan Mesdjid dihalaman Istana merupakan hubungan jang akrab antara negara dan agama.

Di Amerika adat kebiasaan itu ada djuga. Dalam upatjara kenegaraan jg. penting, jaitu pelantikan Presiden baru, dibatjakan ajat² dari kitab Indjil. Malah ada lagi satu kebiasaan, jang kita di Indonesia belum memilikinja. Di Amerika tiap² sidang dari Badan Perwakilan, baikpun di Pusat, maupun dinegara bagian, dibuka dengan sembahjang atau do'a. Ada seorang pendeta, chusus jang dibajar oleh negara jang tugasnja memimpin do'a pada waktu membuka sidang badan perwakilan itu. Senaat Amerika di Washington, mempunjai „the Chaplain of the Senate". Salah seorang Chaplain jang bernama Peter Marshall, adalah orang jang tersohor, jang sesudah itu meninggal, kisah hidupnja dikarangkan dalam buku oleh isterinja dengan djudul : „A man called Peter". Kisah ini sudah didjadikan film dan sudah pula dipertundjukkan di tanah air kita. Sidang² dari badan² perwakilan kita baikpun di pusat maupun di daerah belum ada jang dibuka dengan pembatjaan Qur'an atau dengan do'a (1). Shalawat dan Salam atas sekalian pesuruh Tuhan". Kemudian diiringi dengan do'a mudah²an sidang ini diberi pertundjuk, taufiq dan hidajah oleh Tuhan kepada djalan jang benar".

Dengan bahasa Melaju dan Inggeris). (Red).

Amin!

---

(1) Di Persekutuan Tanah Melaju, pembukaan sidang parlement dimulai dengan : „Dengan nama Allah, Tuhan Jang Maha Pengasih dan Pemurah : Shalawat dan salam atas sekalian pesuruh Tuhan. „Kemudian diiringi dengan do'a mudah²an sidang ini diberi pertundjuk, taufiq dan hidajah oleh Tuhan kepada djalan jang benar".
Red.)

Ketika do'a dibatjakan, semua berdiri dengan chidmat. Setelah selesai Ketua (speaker) memukulkan palunja dan pembitjaraannja-pun dimulai.

Berkenaan dengan Geredja Katholiek, maka dapat digambarkan ada dua princip mengenai hubungan antara negara dan agama. Tapi djika kita pikirkan lebih landjut, bahwa pada achirnja agama itu adalah pedoman bagi manusia dan negara itu tempat hidup manusia untuk mentjapai kesempurnaan, maka dalam diri seseorang, agama dan negara itu tidak dapat terpisah. Hubungan itu dengan kata jang sulit tapi djelas dapat kita batja dalam tanja djawab, jang dilangsungkan antara korresponden News Week, Cortis G. Pepper dengan seorang Jesuit Amerika William van Roo. (News Week 21 Des. 1959).

Tanja : Apakah akan mendjadi suatu persoalan, djika seorang Katholiek mendjadi Presiden dari Amerika Serikat?

Djawab : Tidak.

Tanja : Bagaimana Geredja Katholiek mendudukkan kesetiaan seorang Presiden Amerika jang beragama Katholiek?

Djawab : Geredja Katholiek memandang ia sebagai seorang warga negara dan petugas Amerika, jang di ikat oleh tugas sutji untuk mentjintai dan berbakti kepada negaranja, dan untuk mendjundjung tinggi hukumnja sesuai dengan kejakinannja. Ini kewadjiban moriil jang dipikul oleh semua warga negara dan petugas, dan dalam ini tidak ada sesuatu jang chusus untuk orang Katholiek. Selandjutnja untuk mendjawab jang mungkin chusus dalam pertanjaan ini : orang Katholiek tidak memiliki kesetiaan jang ter-bagi², tidak memilik dwi kewarga-negaraan.

Tanja : Apakah Geredja Katholiek mengharap dari seorang Presiden jang beragama Katholiek, bahwa ia mempertimbangkan „doctrine" dalam keputusannja?

Djawab : Kalau „doctrine" disini berarti peladjaran agama tentang hukum dari Tuhan, maka pertanjaan ini harus didjawab, ja.
Seorang Presiden jang beragama Katholiek atau agama apa sadja harus berbuat sesuai dengan kejakinannja. Sebab bagi tiap² orang jang beragama, ini berarti berbuat, seusai dengan jang ia pandang benar menurut hukum Tuhan.

Tanja : Djika timbul suatu pertentangan antara kepentingan umum Amerika dengan peladjaran agama, mana jang harus didahulukan?

Djawab : Pertanjaan ini untuk saja ragu². Saja artikan bahwa ada suatu pertentangan dalam kejakinan seseorang Presiden Amerika jang beragama Katholiek. Djika demikian maksud pertanjaan itu, maka saja rasa ini mengenai suatu perumpamaan jang mustahil. Dalam kejakinan seorang Katholiek atau seorang jang beragama apapun, tidak mungkin ada suatu pertentangan sematjam itu. Apa sebabnja? Marilah kita artikan „dogma" dalam hal ini „hukum moril dari Tuhan" jang diilhamkan menurut sesuatu geredja.
Kedua, marilah kita misalkan ada suatu masjarakat, dalam masa orang sedang berbeda paham mengenai hukum itu, ditafsirkan ber-beda² menurut agama masing².
Sudah barang tentu antara orang² itu akan timbul pertentangan jang hebat tentang apa jang dipandang kepentingan umum Amerika dalam suatu keadaan chusus. Akan tetapi tiap² orang, apakah ia beragama Katholiek atau agama lain, harus berpegang teguh kepada pendirian, bahwa berbuat benar menurut kejakinannja berarti memperdjoangkan kepentingan dari negaranja jang sebaiknja. Dalam negara demokrasi timbulnja suatu pertentangan paham jang hebat adalah suatu hal jang biasa. Akan mendjadi suatu kedjanggalan, kalau kita memandang salah satu dari pandangan itu merupakan „kepentingan umum Amerika" dan menganggap djika seorang Katholiek menentang pendapat itu berdasar atas kejakinannja, ia bertentangan dengan kepentingan umum Amerika.

Melakukan diskriminasi sematjam itu terhadap kebebasan berfikir bagi orang Katholiek dalam penghidupan Amerika berarti tidak adil, tidak demokratis dan tidak sesuai dengan kepribadian Amerika. Diskriminasi itu dapat dimulai dengan pertjobaan untuk menentang dan menolak pentjalonan seorang Katholiek untuk suatu kedudukan jang tinggi. Djika ini diteruskan dengan konsekwen, maka akan berarti mengetjualikan orang Kaholiek tidak hanja dari pentjalonan Presiden, tapi dari tiap djabatan jang dipilih dan achirnja dari hak memilih.

Soal perpisahan negara dan agama dalam dunia Islam.

Dalam riwajat dunia Islam dimasa jang lampau soal ini tidak pernah menggerakkan ummat, sehingga menimbulkan perpetjahan dan peperangan seperti didunia Barat. Pada umumnja ummat Islam tidak dapat menerima pendirian perpisahan agama dan negara. Agama adalah pedoman jang datangnja dari Tuhan, jang tidak boleh dipisahkan dari penghidupan negara. Tjelakalah negara jang penghidupannja didjauhkan dari peladjaran² agama.

Orang jang sedang menduduki tempat jang bertanggung djawab di negara, djangan djuga mendjauhkan diri dari peladjaran agama. Dalam arti jang demikian, maka dalam diri seorang, terutama orang jang memikul tugas, negara dan agama, atau lebih djelas kejakinannja dan kesadarannja jang dipupuk oleh agamanja, tidak mungkin dipisahkan.

Berkenaan dengan hubungan antara negara dan agama. Islam dengan tegas memberi fungsi kepada masing², sehingga karena itu dalam riwajat ummat Islam tidak ada kesulitan² jang besar seperti didunia Barat.

Agama Islam mengadjarkan bahwa peladjarannja mendjadi pedoman bagi manusia dalam semua tingkatan penghidupan, hidup perseorangan, hidup kekeluargaan, perkampungan, kenegaraan dan antar-kenegaraan.

Adapun mengenai kekuasaan, bagi tiap²nja diberi fungsi jang tegas pembagiannja. Dalam agama, menurut Islam, jang berdaulat adalah hanja Tuhan. Dengan melalui Wahyu Ilahi Ia memberikan FirmanNja, Al Qur'an, kepada ummat manusia. Ia mengangkat seorang Rasul, jaitu Nabi Muhammad Clm. untuk menjampaikan FirmanNja dan untuk melaksanakan perintahNja.

Muhammad jang mendjadi Rasul dan bertugas untuk mempraktikkan adjaran agama Islam dalam masa 23 tahun berhasil mendirikan suatu masjarakat berdasar atas adjaran² Agama Islam, suatu masjarakat jang telah memenuhi sjarat modern seperti zaman sekarang. Dalam masjarakat jang ia tumbuhkan itu, ia mendjadi kepala negara, seperti kita kenal dinegara jang modern. Dalam perkembangan itu maka kita lihat Muhammad menduduki tempat jang unik jang hanja bertemu pada Muhammad sadja, dan tidak pada siapapun djuga. Ia rasul jang diangkat oleh Tuhan, ia Kepala Negara berdasar atas pertumbuhan dan penerimaan rakjat.

Penghidupan Muhammad, apa jang ia lakukan dan katakan, dalam melaksanakan tugasnja, terkumpul dengan sangat teliti dan sempurna dan tersimpan sudah ber-abad² dan akan tersimpan dimasa jang akan datang, sebagai teladan untuk ummat Islam.

Sunnah Nabi mendjadi sumber tersendiri bagi ummat Islam disamping Qur'an, dan tidak ada kekuasaan lain, jang mempunjai otoriteit dalam soal² kepertjajaan.

Waktu Nabi meninggal dunia maka timbul keharusan untuk menggantinja, akan tetapi tidak sebagai Rasul, karena dengan tegas Muhammad dalam Al-Qur'an disebut penutup Rasul. Jang ada keharusan untuk diganti adalah Muhammad sebagai Kepala Negara tidak sebagai Rasul.

Maka dengan demikianlah sangat tegas diatur dalam Agama Islam lapangan masing². Djika sesuatu mengenai kepertjajaan maka orang kembali ke Qur'an dan Sunnah. Hanja dua sumber ini jang mempunjai otoriteit otentik, jang mengikat semua orang Muslim jang pertjaja.

Karya ulama² jang besar², mazdhab² berarti mendjelaskan dan memberi pengertian dari dua sumber.

Wenang pengganti Muhammad sebagai Kepala Negara atau Chalif, tidak boleh memasuki wewenang dari kedua sumber hukum tadi dan sebagai orang Muslim Chalif atau apa namanja pun dalam perkembangan ketatanegaraan dari zaman ke zaman, ia akan berpedoman kepada peladjaran agamanja. Perintahnja, atau pengaturannja mengikat warga-negara, djika memenuhi sjarat² menurut hukum jang mendjadi dasar negara atas musjawarah bersama.

Ditahun 1953 kedjaksaan Agung mengeluarkan surat edaran, jang berisi larangan membitjarakan soal² politik di mesdjid. Surat edaran menimbulkan protest dikalangan Ummat Islam jang luas sekali.

Larangan jang demikian itu terutama suatu kesulitan jang besar bagi para Chatib, jang tiap² hari Djum'at harus berchotbah dihadapan djemaah Islam. Sukar benar untuk menegaskan apa jang termasuk soal² politik apa jang tidak. Tapi terang kewadjiban Chatib adalah memberi Chotbah bagi djemaah jang berguna tidak sadja bagi penghidupan Ummat pada saat sekarang, djuga buat hari kemudian. Chatib akan kurang dalam menunaikan tugasnja, djika ia tidak menjinggung soal² jang sedang dihadapi oleh ummatnja. Dapatkah politik dihindarkan

Digitalized by Gerakan Buku

TAFSIR AL-QUR'AN

Semendjak Mesdjid Agung „Al-Azhar" diramaikan dan ibadat didalamnja digembirakan, maka salah satu diantara amal-ibadat itu ialah mengadji Tafsir Al-Qur'an sesudah sembahjang subuh. Selesai sadja mengerdjakan sembahjang subuh berdjama'ah, diiringi oleh wirid dan do'a jang ma'stur dari Nabi Muhammad s.a.w., dibentuklah halakah dan berkelilinglah para djama'ah, laki² dan perempuan dan dibukalah pengadjian tafsir.

Telah berlaku kebiasaan baik ini beberapa waktu lamanja. Tetapi kian lama kian terasalah pentingnja penafsiran itu dikumpulkan, djangan sampai hilang sadja dibawa angin, jang kadang² djama'ah merasa amat penting dan pajah mengulanginja kembali. Lalu diadakanlah persediaan tape-recorder. Setiap penafsiran itupun ditampunglah dengan pita tape-recorder. Dan setelah madjallah „Gema Islam" ini terbit, banjak pulalah usul supaja barangmana jang telah selesai ditafsirkan, dimuat menempati ruangan jang chas dalam madjallah ini, supaja lebih rata manfaatnja.

Sungguh mundur madju saja mengabulkan permintaan itu, karena ada beberapa kesulitan jang harus diatasi. Kesulitan jang pertama ialas soal huruf Al-Qur'an. Dalam hal jang tidak mengenai dasar, (prinsip), amat djugalah saja bertolak angsur, sebagaimana jang saja atau pengarang lain biasa melakukan, jaitu dipakai sadja huruf Latyn. Tetapi kalau sudah mengenai pengertian Al-Qur'an itu sendiri, termasuklah rasanja kepada me-njia²kan agama kalau kita masih memakai huruf jang bukan hurufnja. Sungguh² huruf Al-Qur'an tidak dapat dilengkapi oleh huruf Latyn, meskipun para orientalist telah mentjari kesepekatan dan istilah² dalam penggantian huruf itu. Padahal istilah pemakaian huruf Latyn untuk pengganti huruf Arab jang digariskan oleh Departemen Agama dengan jang digariskan oleh Kementerian P.D.K. (Dahulu P.P.K.) pun tidaklah sama. Apatah lagi pula pemakaian huruf Latyn dengan tanda² edjaan jang dipakai oleh Ophysen dahulu, jang ada mendekati sedikit kepada kehendak machradj huruf Arab, setelah diganti dengan Edjaan Soewandi sudahlah amat djauh dari penggambaran kehendak bahasa Arab.

Maka tidak ada lain djalan, kalau dalam madjallah ini hendak dimuat Tafsir Al-Qur'an, hendaklah ajat² dan hadist dilengkapi dengan huruf Arab sendiri, dan dibawahnja langsung ditulis ma'na atau ertinja sekali. Sedang Pertjetakan tempat mentjetak madjallah ini tidak pula bersedia huruf Arab.

Kesulitan itu telah dapat diatasi, karena para Redaksi dan Tata-Utaha madjallah ini bersedia mengkelisekan ajat² dan hadist² itu. Oleh karena kesulitan itu telah dapat diatasi, bersedialah saja mengabulkan permintaan itu.

Terdjemah dan Tafsir.

Ulama Islam diseluruh dunia ini, sampai sekarang masih sependapat bahwa Al-Qur'an sukar sekali diterdjemahkan kedalam bahasa lain. Bahasa Arab mempunjai kaedah sendiri dan gaja bahasa sendiri. Al-Qur'an sebagai tiang agung dari bahasa Arab, jang menjebabkan dia mendjadi satu²nja bahasa jang tetap hidup, walaupun telah banjak perobahan zaman, sukarlah diterdjemahkan kedalam bahasa jang lain. Kadang² ada susunan bahasa jang amat indah menurut asli bahasa Arabnja, apabila telah diterdjemah kedalam bahasa lain, hilang keindahan itu. Dituruti menurut aslinja (letterlijk) hilang keindahannja, dan ditukar menurut djalan bahasa tempat menterdjemahkan, pun terasa djuga dalam hati bahwa ada jang hilang. Misalnja;

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ سورة الحجر ٢٣

Kalau diterdjemahkan menurut aslinja demikianlah bunjinja; „Sesungguhnja Kami, Adalah sungguh² Kami, Menghidupkan Kami dan Mematikan Kami dan Kamilah jang mempusakai sekalian".

Dalam bahasa aslinja amatlah indah susunan itu, diperindah pula oleh dua kali ta'kid, jaitu **inna** dipangkal kata dan lam sebelum nahnu, tetapi kalau telah diterdjemah menurut aslinja, terdapatlah kata „Kami" berulang lima kali, dan tidaklah indah bunjinja. Dan kalau diertikan menurut gaja dan peraturan bahasa Indonesia kita tulislah; „Sesungguhnja Kamilah jang menghidupkan dan Kami pula jang mematikan dan kami sekalian pula jang mempusakai".

Dari lima tinggal mendjadi tiga, namun bila diselami lubuk kedua bahasa, terasa bahwa terdjemahan itu belum djuga seindah jang diterdjemahkan.

Diachir sekali sampai kepada kesulitan jang lebih besar, jaitu erti dan tafsir „nahnu" jaitu Kami. Dalam bahasa Melaju lama kalimat kami boleh diutjapkan oleh seorang untuk ganti aku, kalau orang itu Radja. Tetapi bagaimana menafsir dan menterdjemah „Waristûna", sedang dia kata djama'. Apakah Allah itu „banjak"?

Oleh sebab itu maka hampir seluruh Ulama Islam menjatakan pendapat bahwa menterdjemah Qur'an, adalah pekerdjaan jang amat sulit. Dan menulisnja dengan huruf jang selain huruf Arabpun pekerdjaan berbahaja. Entah kalau satu kali bersidang ahli² Islam zaman modern memutuskan sendiri bagaimana bentuk huruf jang disepakati untuk penggantian huruf ashal itu.

Tetapi Ulama² Islam modern-pun betapa pentingnja penterdjemahan, terutama dizaman modern ini, jang anak² Islam sendiri, karena sekian ratus tahun pendjadjahan Barat dan pendidikannja jang masuk ke-negeri² Islam, sudah amat banjak jang perlu mendapat tuntunan Qur'an.

Didalam kitab² fiqhi lama tersebut, haram hukumnja membawa mushhaf Al-Qur'an kenegeri orang kafir. Sekarang orang kafir sendiri jang telah masuk kenegeri Islam, dan bahkan lebih perlu Qur'an itu dibawa dan disiarkan kenegeri kafir, selain perlu disiarkan terlebih dahulu dalam negeri Islam sendiri, jang kian lama kian djauh dari bahasa Arab. Padahal Imam Sjafi'i dengan tegas menjatakan bahwa mempeladjari bahasa Arab adalah fardhu-'ain bagi setiap Muslim, sekurangnja untuk membatja sjahadat dan membatja Fatihah untuk sembahjang. Dan tidak ada Imam lain jang memberikan bantahan kepada pernjataan Imam Sjafi'i itu.

Untuk mengatasi kesulitan penterdjemahan ini, timbullah pula kesatuan pendapat Ulama, karena memang penterdjemahan itu amat penting bagi kokohnja Agama Islam dan penjebarannja, sejogianjalah pada setiap terdjemah itu dituliskan Ajat aslinja dengan huruf aslinja. Gunanja ialah supaja batjaannja jang asli tetap dipeladjari oleh jang mempeladjarinja, djangan se-mata² mengetahui erti dan terdjemah sadja. Kedua, kalau si penterdjemah tersalah menterdjemahkan, maka orang lain diberi kesempatan menegor atau merobahnja dengan mendjelaskan ajat mana jang diterdjemahkan salah itu.

Kian kita perhebat perdjoangan kita memperdalam pengaruh Islam, kita kian sampai kepada kesimpulan bahwasanja selama agama Islam ini jang kita peluk, selama itu pula kita harus mendekati bahasa Arab. Tambah dekat dan tambah berpadu tambah lebih baik.

Tafsir.

Njatalah bahwa kalau kita benar² hendak menafsirkan Al-Qur'an bahwa bahasa itu harus kita ketahui dari sumbernja. Amat berbahajalah Qur'an kita tafsirkan hanja setelah membatja penafsiran orang lain atau penterdjemahan orang lain.

Sjaich Hasan Al-Banna Pembangun Al-Ichwanul Muslimun di Mesir memberi nasehat, kalau hendak merasai ni'mat penafsiran Qur'an, hendaklah Qur'an itu dibatja sendiri dengan tekun dan dimasukkan kehati. Dengan pembatjaan jang tekun itu, moga²

---

dari chotbah Chatib? Akan tetapi tidak itu sadja jang dirasakan sebagai keberatan dari ummat Islam pada waktu itu. Surat edaran itu dirasakan sebagai tjampur tangan dari kekuasaan negara dalam lapangan jang terang masuk lapangan agama. Diwaktu itu ada jang menjatakan keberatannja dengan tjara demikian: Agama Islam sudah tjukup mengatur sjarat² bagi orang jang mendjadi Chatib di mesdjid. Pengaturan itu diberikan oleh Qur'an dan Nabi sendiri. Mesdjid hidupnja lebih dulu dari tiap² negara.

Tidak usah chawatir, Chatib akan mengatjau dalam chotbahnja, akan menjakiti hati orang, akan menaikkan darah akan mengasut. Semua itu sudah lengkap diatur oleh Agama Islam. Achirnja surat edaran itu ditjabut, karena dipandang tidak perlu lagi.